

BAB II

COVID-19 DAN CITRA TIONGKOK

Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia memiliki dampak buruk bagi hampir seluruh sektor kehidupan mulai dari kesehatan, pendidikan, perekonomian, sosial-budaya, politik, hingga hubungan antar negara. Ditemukannya virus pertama kali di Tiongkok membuat negara tersebut tidak terhindar menjadi sorotan dunia, terutama tentang bagaimana mereka menangani pandemi. Hal tersebut kemudian membuat citra Tiongkok bergeser ke arah yang lebih negatif lebih dari yang pernah ada. Oleh karena itu, pada bagian ini akan mengeksplorasi lebih lanjut pertama-tama bagaimana citra Tiongkok sebelum keadaan pandemi, bagaimana Tiongkok merespons dan menangani pada tahap awal pandemi, keadaan pandemi di seluruh dunia, hingga bagaimana citra Tiongkok bisa rusak akibat COVID-19.

2.1. Dinamika Pembangunan Citra Tiongkok di Era Kontemporer

Setelah berdirinya Tiongkok pada tahun 1949, negara ini dipimpin oleh Mao Zedong. Dalam masa kepemimpinan Mao, terdapat beberapa kebijakan ambisius seperti Lompatan Jauh Ke Depan (*The Great Leap Forward*) dan Revolusi Kebudayaan (*Cultural Revolution*). Akibat dari kedua kebijakan ini tidak main-main, yaitu kemerosotan ekonomi dan juga kematian berjuta-juta warga Tiongkok. Menurut penelitian Hailong (2019), beliau mendeskripsikan era Mao ini sebagai masa di mana terdapatnya ‘politik supremasi’, ‘Negara di

Timur yang miskin dan mundur’, dan Tiongkok yang menggunakan ‘*hard power*’.

Pemimpin Tiongkok yang kedua yaitu Deng Xiaoping mengadopsi kebijakan ‘*reform and opening up*’ sebagai strategi perkembangan ekonomi Tiongkok pada Sidang Paripurna ke-3 Partai Komunis Tiongkok ke-11 tahun 1978 (The National Committee of The Chinese People’s Political Consultative Conference, 2021). Kebijakan *reform and opening up* kontras dengan kebijakan ekonomi pada era Mao yang terkontrol menjadi terbuka. Deng mendukung kebijakan tersebut dengan kesigapan, arahan yang jelas dan juga keterampilan politik untuk sukses (Vogel, 2011). Selain itu, Deng juga memperkenalkan kebijakan ‘*open door*’, yang mana kebijakan tersebut membuka pintu kepada investasi asing untuk masuk ke Tiongkok setelah sebelumnya tertutup sejak berakhirnya era Kuomintang (Sung & Song, 1991). Oleh karenanya, kedua kebijakan ini kemudian membuat Tiongkok dikenal sebagai negara yang ekonominya liberal dengan karakteristik Tiongkok (Mirza & Khan, 2021).

Meskipun perekonomian Tiongkok secara garis besar membaik, di akhir masa kepemimpinan Deng terdapat tantangan besar pada kebijakan Tiongkok yang terbuka. Maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan juga kebebasan rakyat dalam berdemokrasi dibatasi menyebabkan sebuah protes besar masyarakat di Tiananmen Square, Beijing pada tahun 1989 (BBC, 2019b). Untuk menghentikan protes, Deng mengerahkan pasukan militer (People’s Liberation Army (PLA)) sebesar

300.000 personel yang dilengkapi dengan persenjataan. Nahasnya, insiden ini kemudian berujung pada pembantaian massal dengan ribuan korban jiwa. Akibatnya, secara global Tiongkok menerima kecaman yang luas. Contohnya AS menghentikan perdagangan senjata, komunikasi antar pejabat level tinggi, dan kerja sama nuklir, dan juga memberikan sanksi serta menunda peminjaman kepada Tiongkok dari Asian Development Bank dan Bank Dunia. Selain AS, negara Jepang, Uni Eropa dan negara-negaranya secara individual memberikan sanksi, sedangkan Australia dan Selandia Baru membatalkan kunjungan pejabat tingkat tinggi.

Setelah Deng turun, Tiongkok dipimpin oleh Jiang Zemin. Pada masa kepemimpinan beliau, Jiang Zemin berusaha keras untuk mengembalikan Tiongkok ke posisi yang stabil sejak protes besar di Tiananmen Square. Tiongkok bekerja baik domestik maupun internasional untuk membentuk kembali citra nasionalnya dari rezim represif menjadi mitra ekonomi dan militer global yang ramah (Cabestan, 2010). Tiongkok juga mulai berfokus memperbaiki citra di panggung internasional sejak masa di awal kepemimpinan Jiang Zemin. Untuk mendukung upaya ini, pada tahun 1990 Tiongkok membentuk Overseas Propaganda Department di bawah the Party Central Committee (berganti nama menjadi Publicity Department pada tahun 1998) dan Kantor Informasi di bawah Dewan Negara pada 1991. Karena Tiongkok begitu memperhatikan citra negaranya, maka dari itu menurut Tiongkok citra negara itu penting dan menjadi salah satu kebijakan luar negerinya.

Dalam memproyeksikan citra negaranya, Tiongkok membuat publikasi berupa *white paper* yang menjawab isu-isu sensitif dan menepis kritik internasional terhadap kebijakan Tiongkok, memperkerjakan ahli media internasional untuk memoles citra Tiongkok dan mensponsori kegiatan kebudayaan di luar negeri (H. Wang, 2003). Sebenarnya, sejak masa Mao pun Tiongkok telah membuat publisitas tentang situasi politik dan tren perkembangan domestik melalui Peking Review (sekarang Beijing Review). Beberapa citra yang Tiongkok coba bangun dari tahun 1954 hingga 1999 secara umum adalah: negara cinta damai, korban agresi asing, negara sosialis, benteng revolusi, kekuatan anti-hegemoni, negara berkembang, kekuatan besar, pekerja sama internasional, dan aktor otonom (H. Wang, 2003).

Standar hidup masyarakat Tiongkok, posisi negara di dunia internasional dan kenaikan PDB dari masa Mao meningkat akibat perubahan oleh penerusnya, membuat Tiongkok dikenal sebagai negara '*rising power*.' Sebagai negara yang kekuatannya bangkit, negara lain takut Tiongkok dapat mengganggu keseimbangan struktur internasional serta dapat melakukan perang dengan lainnya karena militer mereka yang kuat dan modern. Alih-alih dikenal sebagai '*rising power*', justru narasi yang tersebar adalah '*China threat*' (ancaman Tiongkok) (Men, 2003). Untuk menangkal dampak negatif dari perspektif tersebut, Tiongkok mencari inisiatif pada kebijakan luar negerinya yang berfokus kepada kebangkitan Tiongkok yang damai. Oleh sebab itu, lahirlah istilah '*peaceful rise*' yang awalnya diajukan oleh Zheng Bijian, Wakil Presiden dari Central Party School di Forum Boao untuk Asia

pada tahun 2003 (Bijian, 2003). Sejak saat itu, Pemimpin yang ketiga yaitu Hu Jintao mulai mengekspresikan langkah-langkah yang diambil Tiongkok adalah melalui jalan damai dalam kegiatan internasional.

Kebangkitan damai Tiongkok juga dipandu oleh modal, teknologi dan sumber daya yang didapat dari jalur damai (Bijian, 2005). Hal ini juga didukung dengan adanya perbaikan hubungan diplomatik dengan negara lain, partisipasi aktif dalam organisasi internasional, dan perubahan perspektif pada hubungan internasional dan identitas nasionalnya (Men, 2003). Karena konsep kebangkitan damai kerap kali dikaitkan oleh kemajuan ekonomi, Hu merasa hal itu tidak cukup dan harus ada kebijakan yang lebih berorientasi pada masyarakat, komprehensif, seimbang, dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, Hu menambahkan konsep '*harmonious world*' (*Hexie Shijie*) sebagai acuan kebijakan luar negeri yang memiliki makna Tiongkok akan mendukung pembangunan dunia yang harmonis dan kemakmuran bersama (The State Council The People's Republic of China, 2011).

Konsep *harmonious world* menandakan pergeseran pemahaman akan posisi kepemimpinan Tiongkok di dunia termasuk strategi internasionalnya secara keseluruhan (Zheng & Tok, 2007). Dengan sebab itu, pada masa Hu Jintao membuat keadaan perekonomian Tiongkok semakin meningkat dengan PDB mencapai \$5.8 triliun dolar AS pada tahun 2010 (BBC, 2011). Dari nilai PDB tersebut, Tiongkok berhasil menggeser posisi Jepang (\$5.474 triliun) dan menjadi peringkat kedua negara dengan ekonomi terbesar.

Terakhir, Tiongkok dipimpin oleh Presiden Xi Jinping (diangkat menjadi Sekretaris Jenderal CCP pada tahun 2012, dan menjadi presiden pada tahun 2013 dan terpilih kembali pada tahun 2018). Pada pidato di PBB tahun 2017, Xi Jinping memperkenalkan konsep kebijakan luar negeri baru seperti '*a new type of great power relations*,' dan '*a community with a shared future of mankind*' dan mengantarkan Tiongkok pada 'era baru' (Jinping, 2017). Sama seperti para pendahulunya, Presiden Xi masih menjalankan kebijakan *reform and opening up* sebagai landasan ekonomi Tiongkok. Namun, strategi ekonomi yang dijalankan cukup berbeda karena kondisi Tiongkok pada tahun 80an sudah berbeda di tahun 2010an. Hal inilah yang menyebabkan Xi memiliki pemikiran 'sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk era baru' (People's Daily Online, 2017).

Xi juga mempertegas peranan Partai Komunis Tiongkok setelah sebelumnya cukup lemah pada era Deng. Bahkan, Xi membawa negara tersebut lebih terlibat di dalam pemerintahan dunia dibuktikan dengan berdirinya Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk menyediakan dana pembangunan di negara-negara Asia; BRICS Development Bank untuk mempromosikan finansial lebih lanjut dan kerja sama ekonomi di antara kelima negara-negara berkembang yang utama; dan *Belt Road Initiative (BRI)* untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama antar negara di dalam rute tersebut terutama negara-negara di benua Eropa, Asia dan Afrika.

Meskipun demikian, selama satu windu awal kepemimpinan Xi Jinping, masih terdapat maju-mundurnya hubungan dengan negara-negara barat

maupun negara tetangga seperti negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya konflik Laut Cina Selatan yang mana Tiongkok memiliki klaim atas sembilan garis putus-putus (*nine dash line*), sedangkan pembagian wilayah laut tersebut sudah ditetapkan melalui UNCLOS 1982. Klaim ini adalah bukti nyata bahwa Tiongkok memperkuat kedaulatan teritorial, hak dan kepentingan maritim dan persatuan nasional (Jinping, 2014). Dengan demikian, Xi membuat Tiongkok terlihat lebih asertif dalam membuat kebijakan (Sinaga, 2016). Kebijakan asertif yang dimiliki Tiongkok dipandang oleh media barat sebagai tantangan atas *'peaceful rise'* yang diperkenalkan Tiongkok (Okuda, 2016), terutama karena perkembangan ekonomi yang pesat dan juga ekspansi militer yang dilakukan Tiongkok.

Tabel 1. Dinamika Citra Tiongkok dari 1949 – Nov 2019

Pemimpin Tiongkok	Citra Tiongkok	Fokus Bidang citra
Mao Zedong (1949 – 1978)	Negara yang miskin dan mundur	Dalam Negeri
Deng Xiaoping (1978 – 1989)	Ekonomi yang lebih liberal dengan karakteristik Tiongkok	Ekonomi
Hu Jintao (2004 – 2013)	<i>Rising power, peaceful rise, dan harmonious world</i>	Ekonomi dan Politik Internasional
Xi Jinping (2013 – sekarang)	Asertif	Ekonomi, Politik Internasional, dan Militer

Sumber: Data diolah oleh penulis

2.2. Awal Mula dan Respons Pemerintah Tiongkok terhadap Pandemi COVID-19

Sebelum mengenal istilah COVID-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, kasus virus pneumonia ini awalnya bernama *2019 novel coronavirus*, atau disingkat sebagai 2019-n-CoV. Karakteristik dan

gejala-gejala yang dimiliki oleh kasus ini mirip dengan kasus-kasus influenza, SARS dan MERS, meskipun pada akhirnya ditemukan bahwa risiko akhir yang berbeda-beda (Zhu et al., 2020). Terdapat beberapa berita simpang siur yang beredar di Tiongkok sebelum keluarnya pernyataan resmi dari pemerintah. Salah satunya dari dr. Li Wenliang. Beliau merupakan seorang dokter mata yang mencoba memberitahu informasi tentang adanya virus pneumonia yang tidak biasa dijumpai kepada sesama rekan kerjanya pada tanggal 30 Desember 2019 (Caixin Global, 2020). Kabar peringatan ini pun beredar luas di dunia maya sehingga menyebabkan keresahan bagi warga. Karena hal tersebut, dr. Li ditangkap oleh pihak yang berwenang.

Pemerintah Tiongkok juga secara cepat mengambil tindakan agar tidak terjadi keresahan lagi dan melaporkan jumlah kasus yang tercatat per 31 Desember 2019, yaitu 27 kasus dengan 7 yang sangat parah dan sisanya dalam kondisi cukup stabil, namun tetap memerlukan pengawasan (ECDC, 2019). Kabar ini pertama didapatkan dari Komisi Kesehatan Kota Wuhan yang bergerak langsung dalam proses investigasi (Wuhan Municipal Health Commission, 2019). Mereka melaporkan bahwa memang terjadi kasus virus pneumonia yang terjadi di Kota Wuhan. Melalui hasil penyelidikan, tidak ditemukan kemungkinan penularan dari manusia ke manusia lainnya. Selain itu, mereka menyatakan bahwa kasus virus pneumonia ini umum dijumpai pada musim dingin dan semi, cocok dengan waktu kejadian kasus tersebut.

Karenanya, Komisi Kesehatan Kota Wuhan kemudian meyakinkan semua pihak bahwa kasus tersebut masih bisa dicegah dan dikontrol. Dengan

keluarnya laporan dari Komisi Kesehatan Kota, delapan orang termasuk dr. Li, penyebar berita-berita yang mengandung unsur kekeliruan (hoaks) tersebut pun harus diinvestigasi dan dihukum oleh polisi (Xinhuanet, 2020b). Segera setelah mengetahui sumber kasus ini terdapat pada Pasar *Seafood* Hua Nan, mereka menutup, mendesinfeksi, dan memulai penelitian virus dari sana (Global Times, 2020c). Pada tahap awal penelitian, virus pneumonia baru ini memiliki kemiripan dengan virus SARS. Tiongkok yang sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam menangani virus SARS pada tahun 2003, mereka memiliki ketenangan yang lebih dalam mengatasi varian baru virus yang menyerang sistem pernapasan ini (CNN, 2020a). Namun, karena keyakinan tersebut lantas menyebabkan respons Tiongkok sedikit terlambat dalam mengidentifikasi risiko dari virus tersebut.

Sebagai negara yang menjadi titik awal kasus ini, Tiongkok tidak serta merta berdiam diri. Melalui laporan yang dirangkum dan dikeluarkan oleh Xinhuanet, mereka menyatakan posisi mereka dan melaporkan apa saja upaya yang mereka lakukan dalam urutan kronologis yang baru dikeluarkan pada April 2020 (Xinhuanet, 2020a). Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa dalam membagikan informasi dan pengetahuan yang mereka miliki tentang COVID-19 dari awal secara terbuka, bertanggung jawab, dan tidak menutupi apa pun, baik kepada WHO maupun komunitas internasional lainnya. Sepanjang awal bulan Januari (tanggal 2–12) pemerintah melalui Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok (NHC) dan juga Pusat untuk Penanggulangan dan Kontrol Penyakit Tiongkok (China CDC) berhasil mengisolasi jenis

pertama dari virus corona baru, dan langsung menyebarkan penemuan tersebut kepada WHO. Dari temuan tersebut kemudian membantu negara-negara lain dalam mengembangkan alat pendeteksi dan juga vaksin. Hal ini membuktikan komitmen Tiongkok untuk mengedepankan ketepatan waktu dalam memberikan informasi, kerja sama, dan juga penelitian ilmiah (Xinhuanet, 2021a).

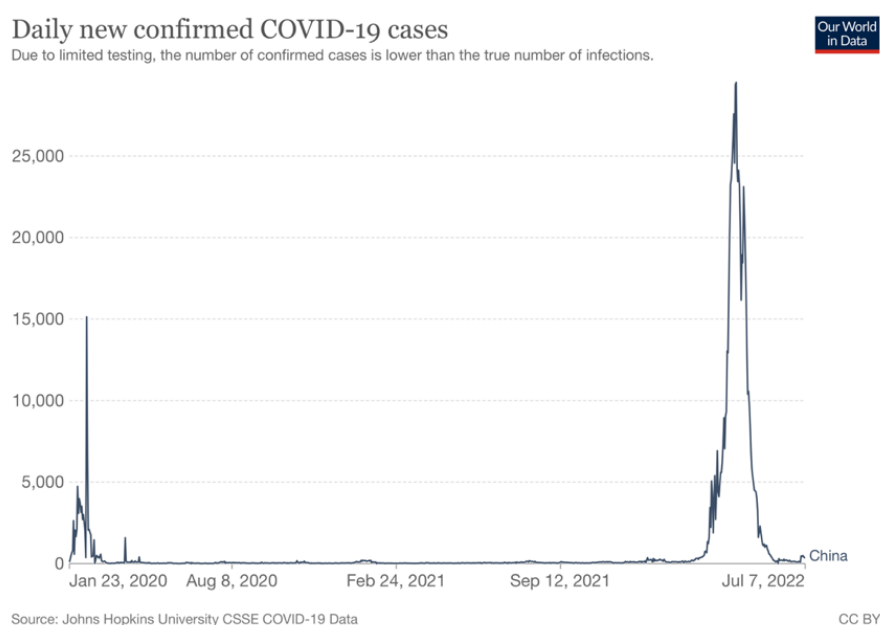
Berbagai langkah awal telah dilakukan oleh Tiongkok untuk mengatasi permasalahan penularan virus. Meskipun demikian, kasus-kasus ‘pneumonia’ ini tetap bertambah dan tidak terkontrol. Pada tanggal 13 Januari 2020, kasus 2019-n-CoV yang sudah terkonfirmasi dilaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus ini telah menyebar ke Thailand sebagai negara pertama di luar Tiongkok (WHO, 2020g). Pada tanggal 15, 19 dan 25 Januari 2020, kasus 2019-n-CoV ini juga secara berurutan ditemukan di Jepang (The Japan Times, 2020), Amerika Serikat (Holshue et al., 2020), dan Perancis (WHO, 2020a). Semua kasus yang disebutkan tadi terdapat satu persamaan, yaitu bagi mereka yang terkena penyakit ini sama-sama baru saja bertolak dari Wuhan. Oleh karena itu, Tiongkok kemudian dengan gencar melakukan hubungan bilateralnya dengan berbagai negara, untuk membantu mengurangi dan mengontrol persebaran virus.

Di waktu yang bersamaan, keadaan di Tiongkok Daratan pun semakin parah, ditandai dengan bertambahnya jumlah kasus yaitu 571 kasus, dengan sebanyak 375-nya dari Provinsi Hubei (WHO, 2020d). Oleh karena itu, pada tanggal 20 Januari 2020, Presiden Xi Jinping memerintahkan upaya tegas

untuk mengekang penyebaran virus (Jinping, 2020). Karena desakan sudah ada dari pemerintah pusat, penanganan akan virus ini semakin ditingkatkan. Setelahnya, Pemerintah Tiongkok mulai menyediakan berita harian tentang jumlah kasus virus corona terkonfirmasi dan dicurigai di seluruh negeri (National Health Commission of the People's Republic of China, 2020). 23 Januari 2020, Tiongkok pun menutup akses ke Wuhan dengan membatalkan penerbangan dan kereta api, menunda bus, kereta bawah tanah dan kapal yang ingin meninggalkan kota, sehingga meninggalkan Wuhan dalam keadaan karantina total atau yang dikenal dengan istilah *lockdown* (Xinhuanet, 2020c). Meskipun berdampak buruk bagi ekonomi, dengan adanya *lockdown* seperti ini maka dapat mencegah persebaran 2019-n-CoV. Karantina total seperti ini belum pernah dilakukan dalam skala yang sangat besar, apalagi dengan keadaan dunia yang sudah lebih modern ini. Pada tanggal 25 Januari 2020, Xi mengadakan Political Bureau Standing Committee untuk membahas situasi COVID-19 dan juga menunjuk Perdana Menteri Li Keqiang sebagai kepala dari kelompok pusat penanganan coronavirus (People's Daily Online, 2020).

Dari ledakan jumlah kasus di Tiongkok Daratan ini kemudian membuat dr. Li yang sebelumnya ditangkap dan dijuluki sebagai *whistleblower* menjadi dipercayai oleh masyarakat karena yang dr. Li lakukan dalam memberikan informasi sebenarnya adalah menyebarkan fakta dan bukanlah sebuah berita palsu untuk menakut-nakuti masyarakat seperti tuduhan yang dilayangkan kepadanya (BBC, 2020c). Seminggu setelah penangkapan, dr. Li menunjukkan gejala virus yang telah beliau katakan sebelumnya dan kemudian meninggal

dunia pada 7 Februari 2020 (The Guardian, 2020d). Hal ini memberikan keyakinan bahwa virus ini nyata dan pemerintah berusaha menutupinya. Meskipun demikian, pada akhirnya pemerintah Tiongkok melakukan upaya-upaya untuk mencoba mengurangi dan membendung persebaran kasus. Tentulah ada alasan bagi Tiongkok untuk mengurangi penyebaran berita palsu di masyarakat, yaitu agar tidak menimbulkan kepanikan sampai benar-benar sudah diselidiki dan terbukti benar.



Gambar 3. Jumlah Kasus COVID-19 di Tiongkok Daratan

Sumber: Our World in Data (Our World in Data, 2022)

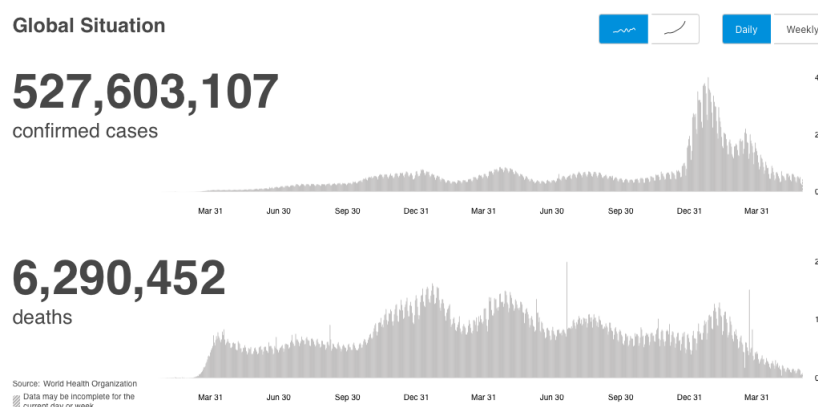
2019-n-CoV kemudian baru secara resmi dinamakan COVID-19 oleh WHO pada tanggal 11 Februari 2020 (WHO, 2020c). Akhirnya, pada 11 Maret 2020, Direktur Jendral WHO mendeklarasikan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi karena sudah terdapat 118.000 kasus tersebar di 114 negara, dan sudah terdapat 4,291 kematian (WHO, 2020f). Memasuki bulan Juli tahun 2020, Tiongkok telah dapat mengontrol COVID-19 (Lancet, 2020). Hal

tersebut dibuktikan dengan menurunnya jumlah kasus penularan. Dukungan yang dimiliki Tiongkok sendiri adalah karena sebelumnya SARS pernah terjadi pada tahun 2002 yang mana sebelumnya mereka sangat tidak siap sehingga Tiongkok lebih sigap dalam menangani pandemi COVID-19. Sayangnya, pada awal tahun 2022, kasus COVID-19 kembali meningkat tajam di Tiongkok diakibatkan virus yang bermutasi (lihat Gambar 3).

Di sisi lain, Tiongkok menuai kritik dan keraguan atas keputusan untuk mengkarantina total Wuhan (The Washington Post, 2020), namun nyatanya langkah brutal tersebut terbukti efektif (The Guardian, 2020b) karena pada bulan Maret, NHC Tiongkok melaporkan tidak adanya ditemukan kasus dari penularan penyakit tersebut (The Guardian, 2020c). Kemudian, karena keberhasilan lockdown ini, negara-negara lain dengan jumlah kasus yang sangat banyak pun mencontoh kebijakan tersebut. Lockdown yang dilakukan tidak harus satu negara secara penuh, namun kebanyakan hanya wilayah-wilayah dari negara tersebut yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi. Meskipun demikian, tidak semua negara dapat mencontoh kebijakan tersebut karena akan bergantung kembali kepada kemampuan negara untuk melaksanakan lockdown dan akan bergantung kepada kebijakan yang lebih menyesuaikan dengan kondisi masing-masing.

Dalam skala global, tidak dapat dicegahnya persebaran COVID-19 menyebabkan virus dengan mudahnya berpindah dari satu orang ke orang lainnya, hingga negara ke negara lainnya. Mau tidak mau, masalah pandemi ini harus menjadi fokus utama bagi pemangku kekuasaan di negara-negara untuk

melawannya. Jika tidak ditangani dengan benar, maka nyawa dari banyak orang akan menjadi taruhannya. Di sisi lain, meski memiliki sumber ancaman yang sama (COVID-19), respons tiap-tiap negara tentulah berbeda-beda tergantung dari negara tersebut. Menurut data dari World Health Organization (WHO) hingga Juni 2022, total kasus COVID-19 di seluruh dunia mencapai 527.603.107, dengan total kematian sebesar 6.290.452 jiwa. Wilayah Eropa memiliki jumlah paling tinggi yaitu sebesar 221.031.491 kasus, di susul Amerika 157,217,991 kasus, wilayah Pasifik Barat 60,439,817 kasus, Asia 58.143.335 kasus, Timur Mediterania 21.777.728 kasus, dan Afrika sebesar 8.991.981 kasus (WHO, 2022).



Gambar 4. Kasus terkonfirmasi COVID-19 hingga awal Juni 2022

Sumber: World Health Organization (WHO, 2022)

Berdasarkan gambat di atas, kasus COVID-19 paling menjulang pada awal tahun 2022. Hal ini disebabkan karena terbentuknya varian baru yaitu varian Omicron. Varian ini pertama kali dideteksi di wilayah Eropa, sehingga kasus mingguan di Eropa mencapai 12 juta kasus. Sebelumnya, pertengahan tahun 2021 juga terdapat varian COVID-19 yaitu Varian Delta yang pertama

ditemukan di India. Varian Delta paling parah menyerang kawasan Asia, hingga 2,8 juta kasus per minggu.

2.3. Rusaknya Citra Akibat Pandemi dan Dampaknya bagi Tiongkok

Menurut Pew Research Center, Tiongkok mengalami kenaikan dalam pandangan negatif terhadapnya tertinggi dalam sejarah dikarenakan adanya pandemi COVID-19 (Pew Research Center, 2020). Adapun negara yang paling mengalami kenaikan pandangan negatif ini dari tahun 2019 adalah Australia yaitu sebesar 24%. Angka tertinggi dipegang oleh Jepang yaitu 86% meskipun tahun sebelumnya juga sudah tinggi yaitu sebesar 85%. Dari 14 negara yang disurvei, median sebesar 61% suara mengatakan Tiongkok telah melakukan penanganan yang buruk dalam mengatasi wabah coronavirus. Hasil lain dari survei ini menyatakan bahwa banyak dari anggota survei ini (Australia, Kanada, Perancis, Jerman, Jepang, Italia, Korea Selatan, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat) juga tidak memiliki kepercayaan diri terhadap bagaimana Presiden Xi mengatasi masalah internasional.

Amerika Serikat memiliki jumlah kasus COVID-19 tertinggi dibandingkan negara lain yaitu sebesar 83.188.551 kasus per Juni 2022. Angka ini tentu saja juga diikuti dengan jumlah kematian tertinggi yaitu 997.161 jiwa. Kasus COVID-19 di AS hampir dua kali lipat dibandingkan negara dengan kasus terbesar yaitu 43.160.832 di India. Tingginya jumlah kasus di AS disebabkan oleh kebijakan yang tidak sama di semua negara bagian atau absennya kebijakan nasional (American Association for the Advancement of

Science, 2020). Selain itu, banyak dari warga AS sendiri tidak percaya dengan adanya COVID-19 dan bahaya yang menyertainya dengan tidak melakukan protokol kesehatan menyebabkan semakin rentannya masyarakat dan meningkatnya penyebaran. Selain itu, laporan dari ILO atau *International Labour Organization* menyatakan bahwa Amerika Serikat juga paling banyak memiliki kasus kehilangan pekerjaan (ILO, 2021). Karenanya, pada masa kepemimpinan Donald Trump, Presiden AS tersebut kerap kali menyuarakan dengan sangat lantang bagaimana posisinya terhadap Tiongkok, dan juga menyalahkan Tiongkok atas pandemi yang terjadi ini. Pelabelan yang dilakukan oleh pejabat AS terhadap COVID-19, di mana Trump menyebutnya sebagai '*Chinese Virus*' dan Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo menyebutnya sebagai '*Wuhan Virus*', adalah bentuk kecaman mereka terhadap Tiongkok yang gagal dalam penanganan awal wabah tersebut (BBC, 2020d). Dalam debat calon presiden AS bulan Oktober 2020, Trump kerap mengatakan bahwa pandemi ini adalah salah Tiongkok, dan tidak seharusnya terjadi, dan juga melabeli pandemi COVID-19 ini sebagai '*China Plague*' (CNN, 2020b).

Pelabelan ini, (*Chinese Virus, Wuhan Virus, China Plague*) menyebabkan stigmatisasi terhadap Tiongkok, yang di mana hal tersebut mempromosikan *xenophobia* dan rasisme. Buktinya adalah terdapat pelabelan serupa terhadap Tiongkok (seperti yang terjadi di AS), yaitu adanya label '*chinese virus*' oleh Argentina, Brasil dan Meksiko. Hal ini juga diperparah dengan munculnya *xenophobia* anti-Tiongkok di Brasil dan Venezuela

Di Australia, ketidakpercayaan terhadap Tiongkok membuat hubungan kedua negara menjadi buruk dan diperparah dengan adanya perang dagang sehingga kemudian merugikan kedua negara tersebut (ABC News Australia, 2020a). Australia juga menyugesti para pemimpin dunia lainnya untuk menyelidiki bagaimana asal-usul dan penanganan awal dari virus corona (ABC News Australia, 2020b). Sedangkan di benua Eropa, menurut survei CEAIS secara keseluruhan sebanyak 10 negara dari 13 negara memiliki pandangan yang negatif terhadap Tiongkok (Turecsányi et al., 2020). Faktor yang mendukung pandangan negatif berdasarkan survei ini bervariasi dari penanganan dan asal muasal COVID-19, kasus hak asasi dan demokrasi di Tiongkok, hingga kekuatan militer Tiongkok. Temuan lainnya dari Ekman & Picardo (2021) menyatakan bahwa COVID-19 memperparah persepsi skeptis di negara-negara Uni Eropa kepada Tiongkok yang sebelumnya berdasarkan situasi hak asasi, ambisi geopolitik dan keadilan dalam hubungan ekonomi saja.

Di wilayah Asia, adapun dalam *white paper* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang menyatakan bahwa Tiongkok mengeluarkan propaganda termasuk menyebarkan informasi yang salah di tengah keadaan sosial yang tidak menentu dan menyebabkan kebingungan (Ministry of Defense Japan, 2020). Di Korea Selatan, pemilik toko dengan jelas menuliskan '*no Chinese welcome*' di depan pintu mereka yang berarti warga Tiongkok tidak diterima di toko tersebut (Al Jazeera, 2020). Hal ini juga diperkuat dengan prasangka yang menyatakan bahwa orang-orang Tiongkok tidak dapat menjaga

kebersihannya. Media Korea Selatan juga memandang Tiongkok bertanggung jawab (*Chinese responsibility view*) atas COVID-19 dan menyalahkan Pemerintah Tiongkok yang menyembunyikan informasi, respons dan tindakan yang lambat terhadap penanganan pandemi (Xiangrong, 2021). Padahal, Tiongkok sendiri merupakan mitra dagang terbesar bagi Korea Selatan dan juga memiliki banyak sekali diaspora Tiongkok di sana. Selain itu, hubungan kedua negara tersebut pada awal pandemi cukup erat dan juga kerja sama yang terjalin dalam menangani pandemi cukup baik yaitu dengan saling membantu mengirimkan alat-alat kesehatan, tetap tidak cukup baik untuk meredakan sentimen anti Tiongkok di Korea Selatan.

India juga memiliki pandangan skeptis India terhadap penanganan kasus COVID-19 oleh Tiongkok (Madan, 2020). Hal tersebut kemudian membuat negara India mengambil langkah tegas dengan memperketat *Foreign Direct Investment* (FDI) dari negara yang berbatasan langsung dengan India untuk membendung langkah oportunistis seperti mengakuisisi perusahaan-perusahaan di India (The Hindu, 2020). Hal ini kemudian buruk bagi Tiongkok, karena Tiongkok termasuk sebagai negara yang berbatasan dengan India.

Dalam segi ekonomi, negara-negara di Afrika adalah negara yang paling terpengaruh akibat COVID-19. Di bagian belahan bumi lainnya, meskipun di wilayah Afrika memegang jumlah kasus paling kecil, namun menurut WHO angka seharusnya justru 97% lebih besar daripada yang tercatat (WHO Regional Office for Africa, 2022). Hal ini dikarenakan oleh sistem kesehatan di Afrika yang tidak cukup mendukung. Akibatnya, semua sektor ekonomi

Afrika terpengaruh terutama di pariwisata dan ekspor minyak. Menurut African Development Bank, PDB menyusut hingga 2.1% pada tahun 2020, dan pendapatan ekspor minyak diproyeksikan menyusut sebesar 65 miliar dolar AS (United Nations Africa Renewal, 2020). Perekonomian yang sudah lemah ini kemudian diperparah oleh banyaknya kasus korupsi yang merajalela (Institute for Security Studies, 2022).

Pandemi COVID-19 di Afrika juga menyebabkan masalah yaitu pengentasan kemiskinan akan menjadi semakin susah dilakukan. Hampir 30 juta jiwa akan terdorong ke tingkat kemiskinan ekstrem pada tahun 2020, dan diprediksi akan bertambah hingga 39 juta jiwa pada 2021 (African Development Bank, 2021). Mereka yang memiliki tingkat edukasi rendah, sedikit aset dan bekerja pada sektor informal adalah yang paling terpengaruh. Ketidaksetaraan juga meningkat terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, muda-mudi, dan pekerja dengan kompetensi yang rendah (kelompok yang pekerjaannya tidak mungkin dilakukan dari rumah).

Hermann Wasserman dan Dani Madrid-Morales meneliti tentang mengenai dampak disinformasi masyarakat Kenya dan Afrika Selatan mengenai Tiongkok dan COVID-19 menyatakan bahwa pada masa puncak pandemi COVID-19 gelombang pertama, baik masyarakat di Kenya maupun Afrika Selatan sama-sama memiliki pandangan yang negatif terhadap Tiongkok. Mereka menganggap bahwa Pemerintah Tiongkok lebih tidak kompeten dan tidak jujur dari pada Pemerintah Amerika Serikat (The Conversation, 2021). Sejak awal kemunculan kasus COVID-19, penduduk di

Afrika Selatan maupun Kenya sama-sama memiliki pandangan yang berprasangka buruk kepada warga keturunan Tiongkok maupun kulit putih lainnya. Prasangka-prasangka buruk dan stigmatisasi yang terbentuk di antara masyarakat banyak tersampaikan melalui media-media sosial, khususnya Twitter (Quartz Africa, 2022). Di Kenya sendiri, ketakutan dan prasangka buruk terhadap Tiongkok bahkan sudah muncul sebelum kasus pertama yang terkonfirmasi di Kenya saat pesawat komersial dari Tiongkok mendarat di Nairobi pada 26 Februari 2020 (Quartz Africa, 2022).

Selaras dengan persepsi dari negara lain terhadap Tiongkok, masyarakat luas Tiongkok juga memiliki pandangan yang buruk terhadap pemerintah mereka sendiri. Kasus dr. Li Wenliang yang menyerukan adanya virus yang mudah menular di media sosial pada awalnya disebut sebagai hoaks, hingga akhirnya hal tersebut memang terbukti benar. Alih-alih membuktikan hoaks tersebut, pemerintah Tiongkok justru menutup akun beliau dan menghapus akun-akun yang mendukung dr. Li (BBC, 2020a). Meskipun demikian, masyarakat umum justru lebih percaya kepada pemerintahan lokal daripada pusat karena pemberlakuan *lockdown* yang masih dapat ditoleransi (Su et al., 2021).

Seiring berjalannya waktu, tentu Tiongkok tidak tinggal diam dalam upaya penanganan pandemi. Selain memberlakukan *lockdown*, pelacakan sumber virus, dan juga memberikan pelayanan kesehatan baik untuk masyarakat dalam maupun luar negeri, Tiongkok juga mengembangkan vaksin untuk COVID-19. Selama pengembangan vaksin COVID-19, Tiongkok

disalahkan karena menutupi akses-akses bagi negara lain untuk mendapatkan sampel virus COVID-19 (BBC, 2021a). Hingga pada akhirnya Tiongkok telah mengeluarkan vaksinnya, negara lain baru mendapatkan akses terhadap sampel tersebut. Dengan munculnya vaksin keluaran perusahaan dari Barat, vaksin dari Tiongkok ini justru dibanding-bandingkan efektivitasnya. Menurut studi yang dilakukan oleh BioSpace, efektivitas yang dimiliki oleh vaksin keluaran perusahaan Tiongkok memiliki tingkat paling rendah dibandingkan vaksin lainnya (BioSpace, 2021). Hal ini kemudian menjadi salah satu dalam permasalahan baru, yaitu *vaccine hesitancy* atau penolakan terhadap vaksin Sinovac (Zaini & Ha, 2021).

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar ke dua, penurunan ekonomi Tiongkok adalah sebesar 6,8% pada kuartal pertama 2020 (BBC, 2020b). Ekspor Tiongkok yang pada Desember 2019 sebesar 2.386,38 USD HML, menurun pada Januari 2020 dengan angka 2.115,97 USD HML, dan terjun bebas pada Februari 2020 dengan hanya 803.79 USD HML (Trading Economics, 2020). Tidak hanya itu, penurunan juga dialami oleh sektor pariwisata yang sepanjang 2020 diperkirakan turun sekitar 40% (Global Times, 2020b). Hal ini merupakan konsekuensi dari buruknya citra Tiongkok, yang juga diakibatkan dari buruknya hubungan bilateral maupun multilateral Tiongkok dengan negara-negara lain.

2.4. Kesimpulan

Tidak ada negara yang tidak terpengaruh oleh pandemi ini. Semua memiliki masalahnya masing-masing dan cara penanganan yang berbeda pula. Amerika

Serikat adalah negara yang paling terpengaruh akibat pandemi ini, mulai dari banyaknya kasus dan kematian akibat COVID-19, hingga banyaknya pekerjaan yang hilang bagi masyarakatnya. Namun, jika negara siap dalam menghadapi krisis kesehatan, terutama yang memiliki sistem kesehatan yang baik maka negara tersebut dapat mengontrol pandemi lebih baik. Sebaliknya, jika negara tersebut sistem kesehatannya masih tidak terlalu baik seperti di Afrika, maka kondisi pandemi akan parah.

Jatuh banggunya citra negara Tiongkok dari masa Mao Zedong hingga Xi Jinping diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Respons Tiongkok terhadap virus ini memang terlambat yang kemudian berakibat berpindahya virus ini ke seluruh dunia dengan mudahnya. Ditambah fakta Pemerintah Tiongkok yang membungkam masyarakatnya yang mencoba untuk memberitahukan adanya virus ini, menambah kritikan dari negara-negara yang menerima dampaknya. Meskipun demikian, setelah virus dinyatakan sebagai pandemi, Tiongkok mengambil langkah cepat dengan mengarantina Wuhan. Hasilnya, kasus di Tiongkok daratan dapat berkurang. Sayangnya, karena virus tersebut sangat menular dengan cepat, virus yang sudah berpindah negara menjadi masalah besar di seluruh dunia. Akibatnya, Tiongkok memperoleh citra sebagai negara yang pengendaliannya buruk terhadap pandemi, penyebar propaganda dan berita palsu. Selain itu, dampak langsung bagi kegiatan perekonomian, pariwisata, sosial-budaya, hingga membahayakan masyarakat Tiongkok terutama yang berada di luar negeri.